



PRAKTIK TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAITUL MAL GAMPONG KOTA BANDA ACEH

Mursalmina

Departement Islamic Economic, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, Indonesia
mursalmina@ar-raniry.ac.id

Aqila Thahira

Departement Islamic Economic, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, Indonesia
210602079@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik transparansi dan dalam pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Gampong (BMG) di Kota Banda Aceh, khususnya pada BMG Geuceu Iniem dan BMG Lamdingin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kedua BMG telah berusaha melakukan praktik transparansi meliputi pengungkapan informasi ke publik, mendokumentasikan Laporan Tahunan, memberikan akses informasi ke publik serta memberikan ruang bagi publik untuk memberikan evaluasi. Meskipun ada komitmen yang kuat dari 2 lembaga tersebut terhadap transparansi, implementasinya masih terbatas oleh berbagai kendala, terutama keterbatasan dana operasional serta sumber daya manusia. Hal ini menghambat kemampuan BMG untuk melakukan audit resmi, memodernisasi sistem informasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lembaga. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses publik terhadap informasi masih minim, yang membatasi keterbukaan informasi. Ketiadaan standar operasional khusus BMG yang tertulis membuat sistem operasional di setiap BMG berbeda-beda tergantung kepada kesepakatan para pengurus di setiap BMG.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Zakat, Baitul Mal Gampong, Kota Banda Aceh*

Abstract

This study aims to thoroughly examine the practice of transparency in the management of zakat funds by Baitul Mal Gampong (BMG) in Banda Aceh City, specifically focusing on BMG Geuceu Iniem and BMG Lamdingin. This research employs a qualitative approach, with interviews as the primary data collection technique. The study reveals that both BMGs have made efforts to implement transparency practices, including public disclosure of information, documentation of annual reports, providing public access to information, and allowing the public to offer evaluations. Despite the strong commitment of these two institutions to transparency, its implementation remains limited by various challenges, particularly the constraints of operational funds and human resources. These limitations hinder the BMGs' ability to conduct official audits, modernize information systems, and improve institutional management efficiency. Additionally, the use of information technology to expand public access to information is still minimal. The absence of specific written operational standards for BMGs results in operational systems that vary from one BMG to another, depending on the agreements made within each BMG.

Keywords: *Transparency, Accountability, Zakat Management, Baitul Mal Gampong, Banda Aceh City*

A. PENDAHULUAN

Baitul Mal adalah salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan harta keagamaan di Aceh, khususnya zakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, Baitul Mal Gampong memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana yang mereka kelola digunakan secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola yang baik dalam lembaga-lembaga keuangan Islam, transparansi menjadi pilar utama yang harus dijaga dan ditingkatkan oleh Baitul Mal Gampong

Baitul Mal Gampong atau yang disingkat dengan BMG merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memelihara serta mengelola harta keagamaan berdasarkan Syariat Islam demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak Baitul Mal Gampong harus menjalankan tata kelola lembaga sesuai dengan amanat Qanun Aceh yang berasaskan kepada beberapa prinsip utama, diantara-Nya adalah transparansi (Qanun, 2018).

Eksistensi lembaga Baitul Mal Gampong di Kota Banda Aceh menjadi kokoh dengan di sahkan Peraturan wali kota Banda Aceh tahun 2021 yang mengatur secara spesifik terkait tata kelola lembaga tersebut. Salah satu poin yang di muat dalam PERWAL tersebut adalah terkait Biaya Operasional lembaga yang dibebankan pada senif amil zakat (*Perwal_No_38_Tahun_2021.Pdf*, n.d.). Poin ini menunjukkan bahwa Berjalannya tata kelola lembaga Baitul Mal Gampong sangat tergantung kepada loyalitas Muzakki dalam membayar zakat.

Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang di terbitkan oleh KNKG memberikan definisi yang jelas terkait indikator Transparansi. Nilai transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjawab hak warga negara untuk memiliki akses terhadap informasi tentang hal yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dalam hal tersebut, pejabat pemerintah diharapkan untuk seterbuka mungkin dalam mengungkapkan informasi kepada publik mengenai keputusan, tindakan, dan transaksi yang dilakukan serta memberikan alasan atas tindakan tersebut. Pengungkapan informasi mensyaratkan dokumen publik yang mudah dipahami untuk disebarluaskan atau dapat disediakan berdasarkan permintaan. Informasi yang dipublikasi mengenai kinerja dan kegiatan pemerintah, seperti laporan keuangan rutin yang disahkan oleh lembaga audit independen, memungkinkan publik memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pemerintah (Governansi, 2022).

Transparansi dalam konteks pengelolaan zakat berarti bahwa setiap tahap dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ini termasuk penyajian informasi yang jelas mengenai jumlah dana yang dikumpulkan, alokasi dana, serta kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima zakat. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap BMG dapat menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada efektivitas pengelolaan zakat itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan (Afiza et al., 2023; Fikri & Najib, 2021; Junjuran et al., 2020) yang membuktikan bahwa faktor Transparansi sangat berpengaruh terhadap loyalitas Muzakki dalam menyalurkan dana zakat, semakin tinggi tingkat transparansi sebuah lembaga pengelola zakat maka akan semakin tinggi pula Loyalitas Muzakki dalam menyalurkan dana Zakat.

Pusat kajian Strategis Baznas dalam (Yusra & Riyaldi, 2020) menyampaikan bahwa untuk mengukur tingkat transparansi dan Akuntabilitas lembaga zakat belum memadai saat ini disebabkan belum tersedianya alat ukur standar yang relevan, namun beberapa peneliti mencoba mengukurnya dengan pendekatan masing-masing, seperti yang dilakukan oleh (Nurfadhilah, 2019) dan (Karim et al., 2019) yang menggunakan laporan keuangan yang tersedia di website resmi lembaga zakat sebagai referensi dari transparansi dan Akuntabilitas. (Nugraha, 2019) juga menegaskan bahwa lembaga Pengelola Zakat adalah lembaga yang mengemban amanah dan kepercayaan publik, oleh karena itu lembaga tersebut berkewajiban mencatat dan melaporkan setiap dana yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan serta mudah diakses oleh masyarakat.

Adapun penelitian ini ingin memperlihatkan bagaimana Implementasi Transparansi pada Baitul Mal Gampong berdasarkan pada beberapa acuan yang di terdapat dalam (Governansi, 2022) dirilis oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, yaitu : Pengungkapan Informasi kepada Publik; Adanya laporan Berbentuk dokumen/Bukti Fisik; Informasi Mudah di Akses; Informasi dapat di evaluasi oleh Publik.

Berimplikasi dari latar belakang di atas maka Penelitian ini berfokus pada praktik Transparansi pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Gampong Kota Banda Aceh, khususnya di BMG Geuceu Iniem dan BMG Lamdingin yang merupakan 2 BMG yang sedang berkembang di kota Banda Aceh berdasarkan Observasi awal Peneliti dan Rekomendasi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Peneliti mencoba melakukan Wawancara dengan pengurus Baitul Mal Gampong untuk mendapatkan data sejauh mana Transparansi telah di praktikkan dengan merujuk kepada acuan yang telah peneliti sebutkan di atas, Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Komisioner Baitul Mal Kota sebagai Pembina dari Baitul Mal Gampong, Peneliti juga mencoba mendokumentasikan bukti Transparansi tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mencoba mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Baitul Mal gampong dalam implementasi transparansi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola BMG dan menawarkan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan akademis yang penting tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat lokal.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Transparansi

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam pemerintahan, keuangan, dan manajemen. Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan publik untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan hasil dari suatu organisasi atau institusi. Transparansi adalah konsep yang mengacu pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi, yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses data dan proses pengambilan keputusan yang relevan. Transparansi bukan hanya tentang ketersediaan informasi, tetapi juga tentang kejelasan, akurasi, dan aksesibilitasnya (Governansi, 2022). Menurut (Mcguire & Porumbescu, 2016) bahwa transparansi mendorong peningkatan kepercayaan publik dan mengurangi risiko perilaku oportunistik di sektor publik dan swasta.

Komite Nasional Kebijakan Governance (Governansi, 2022) Merilis beberapa indikator acuan dalam mengukur Transparansi, yaitu :

1) Pengungkapan Informasi ke Publik

Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah harus jelas, mudah dipahami, dan disediakan secara berkala, seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh lembaga independen. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

2) Adanya Laporan berbentuk dokumen/bukti fisik

Simons menyampaikan bahwa Tersedianya bukti dalam bentuk dokumen sebagai bagian dari transparansi dalam tata kelola sektor publik. Dalam literatur manajemen dan akuntansi, ketersediaan dokumen fisik yang rapi sering kali disebut sebagai salah satu indikator dari tata kelola yang baik. Model bukti fisik seperti berikut ini :

a. Laporan Keuangan

Dokumen laporan keuangan merupakan salah satu bentuk utama dari bukti yang diperlukan untuk memastikan transparansi fiskal. Laporan keuangan ini harus diaudit oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mencakup informasi tentang pendapatan dan belanja pemerintah serta informasi non-keuangan lainnya yang relevan.

b. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Proses penganggaran di sektor publik melibatkan beberapa dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen ini menjadi bukti dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran pemerintah daerah.

c. Deklarasi Aset Penyelenggara Negara

Deklarasi aset pejabat Negara juga merupakan bentuk dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah konflik kepentingan. Dokumen ini mencakup rincian informasi mengenai harta kekayaan, pendapatan, pengeluaran, dan kepentingan lainnya yang dimiliki oleh penyelenggara negara.

d. Sistem Pengendalian dan Audit

Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang memadai, yang menghasilkan dokumen-dokumen terkait pelaporan dan evaluasi anggaran. Hal ini diperlukan untuk menjamin akuntabilitas publik dan memastikan bahwa anggaran dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan strategis. Ketika tidak ada audit resmi, ada potensi risiko yang tidak teridentifikasi dalam pengelolaan dana. Audit eksternal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau ketidaksesuaian yang luput dari perhatian

3) Informasi mudah di akses

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang keputusan, tindakan, dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi menuntut agar informasi tersebut disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik

4) Informasi dapat dievaluasi oleh publik

Transparansi mendukung proses akuntabilitas dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas pemerintah, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik.

(Hood & Heald, 2012) mengidentifikasi beberapa dimensi utama dari transparansi, yaitu:

- a. **Transparansi Prosedural:** Merujuk pada keterbukaan mengenai proses dan prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup informasi tentang langkah-langkah yang diambil dan bagaimana keputusan tersebut dicapai.
- b. **Transparansi Kebijakan:** Berkaitan dengan keterbukaan mengenai tujuan, sasaran, dan kebijakan yang diimplementasikan. Ini memungkinkan publik untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan.
- c. **Transparansi Hasil:** Melibatkan keterbukaan mengenai hasil dari kebijakan atau program yang diimplementasikan. Ini mencakup informasi tentang apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak.

Dalam literatur yang lain (de Fine Licht & de Fine Licht, 2020) menambahkan beberapa dimensi seperti :

- a. **Transparansi Informasional:** Merujuk pada keterbukaan informasi secara menyeluruh yang mencakup data-data penting mengenai kebijakan, keuangan, dan kinerja organisasi (Grimmelikhuisen & Meijer, 2015).
- b. **Transparansi Operasional:** Menyentuh aspek keterbukaan dalam operasional sehari-hari, termasuk bagaimana layanan publik disediakan dan bagaimana sumber daya dikelola.

Transparansi dalam organisasi atau institusi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk:

- a. **Regulasi dan Kebijakan:** Kebijakan yang jelas dan komprehensif mengenai transparansi sangat penting untuk mendorong keterbukaan. Menurut laporan (Heald, 2013), regulasi yang memadai memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi terutama dalam sektor publik.
- b. **Teknologi Digital:** Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform e-government dan media sosial, dapat meningkatkan transparansi dengan memperluas akses terhadap informasi publik (Criado & Gil-garcia, 2019).
- c. **Budaya Organisasi:** Budaya yang mengedepankan keterbukaan dan kolaborasi sangat mendukung peningkatan transparansi.

2. Tantangan Implementasi Transparansi

Walaupun transparansi memiliki banyak manfaat, namun implementasinya tidak lepas dari tantangan. Penelitian oleh (McGuire & Porumbescu, 2016) menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keterbukaan informasi. Selain itu, biaya yang terkait dengan penerapan sistem transparansi yang efektif juga dapat menjadi hambatan, terutama bagi organisasi kecil atau negara berkembang (Governansi, 2022)

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan transparansi adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara sistem yang mendukung

keterbukaan informasi. Biaya implementasi ini mencakup beberapa aspek penting, yang dapat membebani organisasi, terutama di negara berkembang atau di organisasi yang memiliki keterbatasan sumber daya.

1) Biaya Teknologi

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, terutama melalui penggunaan platform digital yang memungkinkan akses informasi secara luas. Namun, pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan teknologi ini memerlukan investasi yang signifikan. Contoh teknologi yang diperlukan meliputi sistem manajemen informasi, perangkat lunak untuk analitik data, dan infrastruktur untuk keamanan siber yang melindungi data dari ancaman kebocoran atau serangan. Menurut laporan (Heald, 2013), penerapan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung transparansi dapat menelan biaya jutaan dolar, tergantung pada skala dan kompleksitas sistem yang dibutuhkan.

2) Biaya Pelatihan Sumber Daya Manusia

Selain investasi dalam teknologi, implementasi transparansi juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pegawai dan pemangku kepentingan terkait perlu dilatih untuk menggunakan sistem baru, memahami pentingnya transparansi, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola informasi dengan cara yang sesuai. Menurut (Criado & Gil-garcia, 2019), program pelatihan yang efektif memerlukan alokasi waktu dan anggaran yang cukup, serta dukungan dari manajemen tingkat atas. Tanpa pelatihan yang memadai, investasi dalam teknologi transparansi tidak akan memberikan hasil yang optimal, karena pegawai mungkin tidak mampu mengoperasikan sistem secara efektif atau memahami bagaimana informasi harus disajikan.

3) Biaya Pemeliharaan dan Pengawasan

Setelah sistem transparansi diimplementasikan, organisasi harus terus melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sistem tersebut. Ini mencakup pembaruan perangkat lunak, pengelolaan data yang terus bertambah, serta peningkatan fitur keamanan untuk melindungi informasi dari ancaman yang terus berkembang.

(Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015) menekankan bahwa biaya pemeliharaan ini sering kali diabaikan dalam tahap perencanaan awal, tetapi dapat menjadi beban yang signifikan dalam jangka panjang. Tanpa pemeliharaan yang memadai, sistem transparansi dapat menjadi usang atau tidak mampu menangani permintaan informasi yang semakin meningkat.

4) Biaya Administrasi dan Kepatuhan

Penerapan transparansi sering kali disertai dengan kewajiban administratif yang meningkat. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka mematuhi berbagai regulasi dan standar terkait transparansi, yang mungkin berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan sektor industri. Ini memerlukan staf tambahan atau sumber daya khusus untuk memastikan bahwa organisasi tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku.

5) Biaya Risiko dan Kontingensi

Terakhir, ada biaya yang terkait dengan manajemen risiko dan kontingensi yang mungkin timbul akibat penerapan transparansi. Misalnya, keterbukaan informasi dapat meningkatkan risiko bagi organisasi terkait keamanan data dan privasi, yang pada akhirnya

memerlukan investasi tambahan dalam asuransi, audit keamanan, atau penanganan insiden. (Heald, 2013) mencatat bahwa organisasi harus siap menghadapi potensi biaya yang muncul dari risiko yang tidak terduga, yang dapat mempengaruhi anggaran keseluruhan untuk transparansi.

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang praktik transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Gampong (BMG) di Kota Banda Aceh, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam implementasinya.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang seperti yang tercatat dalam tabel berikut:

Nama Lembaga	Nama Informan	Jabatan Informan
Baitul Mal Kota Banda Aceh	Abdul Munir	Komisioner BMK
Baitul Mal Gampong Geuceu Iniem	Deddy Harlianto	Sekretaris BMG
Baitul Mal Gampong Lamdingin	Tgk. Miksalmina	Ketua BMG

Data diolah oleh peneliti (2024)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan subjek penelitian yang telah disebutkan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, dengan fokus pada tiga masalah yang menjadi dasar penelitian ini.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Transkripsi: Semua data dari wawancara akan ditranskrip secara verbatim untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat.
2. Pengodean (Coding): Transkrip wawancara akan dikode berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti transparansi, dan tantangan implementasi.
3. Kategorisasi: Tema-tema yang telah dikode kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Misalnya, transparansi dapat dikategorikan berdasarkan jenis informasi yang diungkapkan, media pengungkapan informasi yang digunakan, dan Keterbukaan akses publik.
4. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan tema dan kategori yang telah diidentifikasi, peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana praktik transparansi yang diterapkan di BMG serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Transparansi Baitul Mal Gampong Dalam Mengelola Dana Zakat

Setelah Peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Pengurus Baitul Mal Gampong Geuceu Iniem serta Pengurus Baitul Mal Gampong Lamdingin untuk memperoleh data tentang Praktik Transparansi maka Hasil penelitian serta pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengungkapan Informasi ke Publik

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, bahwa pihak BMG telah memberikan informasi kepada masyarakat baik tentang kinerja organisasi maupun tentang laporan keuangan yang mereka arsipkan setiap satu tahun sekali.

Pengungkapan informasi pada BMG Geuceu Iniem dilakukan dengan membagikan exemplar laporan aktivitas BMG maupun kinerja keuangan kepada setiap Muzakki setiap tahun, adapun bagi masyarakat umum atau publik yang ingin mendapatkan akses terkait laporan tahunan tersebut dapat langsung berkunjung ke kantor BMG Geuceu Iniem dan melihat langsung rekapan laporan keuangan maupun aktivitas tahunan BMG. Menurut hasil Observasi peneliti, bahwa peneliti menemukan dokumen rekapan laporan tahunan tersebut di Kantor BMG Geuceu Iniem dengan lengkap dan tertata dengan rapi.

Adapun pengungkapan informasi pada BMG Lamdingin dilakukan dengan menyebarkan rekapan laporan tahunan baik ke Muzakki maupun ke Publik dengan media komunikasi online dan lainnya. Pihak BMG menambahkan bahwa mereka tidak hanya menyebarkan laporan di setiap tahunnya namun juga mensosialisasikan setiap aktivitas yang akan di laksanakan dalam bentuk Banner/spanduk yang di pasang di tempat umum seperti Mesjid dan lainnya, selain itu sosialisasi juga mereka lakukan dengan memberikan instruksi kepada setiap kepala Dusun untuk memberikan informasi kepada setiap warga di dusunnya.

Ketika Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak BMG, Komisioner BMK bidang Baitul Mal Gampong menyampaikan bahwa pihak BMK juga mendapatkan dokumentasi dari laporan Tahunan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan pembinaan sesuai instruksi dalam Qanun Aceh dan juga Peraturan Wali Kota Banda Aceh.

Pengungkapan Informasi kepada stakeholder dan publik telah di lakukan oleh pihak BMG seperti yang di sampaikan oleh (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015) bahwa Transparansi Merujuk pada keterbukaan informasi secara menyeluruh yang mencakup data-data penting mengenai kebijakan, keuangan, dan kinerja organisasi. Seperti itu juga yang di ungkapkan (Governansi, 2022) bahwa konsep transparansi mengacu pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi, yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses data dan proses pengambilan keputusan yang relevan. Transparansi bukan hanya tentang ketersediaan informasi, tetapi juga tentang kejelasan, akurasi, dan aksesibilitasnya.

b. Adanya Laporan berbentuk dokumen/bukti fisik

Informasi yang peneliti telah kumpulkan melalui hasil penelitian di lapangan tentang adanya laporan berbentuk dokumen/bukti fisik bahwa peneliti menemukan dokumen rekapan laporan tahunan yang memuat informasi seputar pengelolaan anggaran serta aktivitas BMG di setiap tahunnya dengan lengkap dan tertata dengan rapi, Ini menunjukkan adanya usaha dalam mendokumentasikan aktivitas mereka dengan baik namun bukti fisik laporan tahunan tersebut dibuat untuk bahan pelaporan kepada dewan penasehat tanpa melalui proses audit resmi oleh pihak Auditor, dan disini masih ada celah timbulnya risiko dalam pengelolaan dana karena Ketersediaan dokumen fisik yang rapi merupakan indikasi dari akuntabilitas internal yang baik. Namun, ketiadaan audit resmi menunjukkan bahwa masih ada potensi risiko dalam pengelolaan dana yang mungkin tidak teridentifikasi tanpa evaluasi eksternal yang lebih mendalam.

c. Informasi Mudah di akses Publik

Pihak BMG menyampaikan kepada peneliti melalui sesi wawancara bahwa informasi yang mereka rekam dapat di akses bebas oleh masyarakat publik. Pihak BMG menambahkan bahwa kantornya terbuka kepada siapa saja yang belum mendapat akses terkait laporan tahunan dan memiliki keinginan untuk melihat laporan aktivitas serta laporan keuangan BMG.

Informasi yang disediakan oleh BMG relatif mudah diakses oleh publik, namun akses ini lebih bersifat pasif, di mana masyarakat harus datang langsung ke kantor BMG atau berkomunikasi dengan pihak BMG untuk melihat laporan. Meskipun ada niat baik untuk keterbukaan, pendekatan ini tidak cukup proaktif dan dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Dalam era digital, langkah-langkah yang lebih inovatif perlu diambil untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat luas.

Praktik ini menunjukkan adanya komitmen dari kedua BMG untuk terbuka kepada masyarakat, meskipun keterbukaan ini masih terbatas, Penggunaan teknologi seperti website untuk publikasi informasi belum maksimal, yang menandakan ada ruang untuk peningkatan di bidang ini. Menurut (Criado & Gil-garcia, 2019) Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform e-government dan media sosial, dapat meningkatkan transparansi dengan memperluas akses terhadap informasi publik.

d. Dapat di Evaluasi oleh Publik

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BMG terkait sejauh mana publik dapat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap aktivitas BMG, maka peneliti mendapatkan informasi dari pengurus BMG bahwa mereka sangat terbuka untuk di evaluasi oleh siapa saja termasuk pihak masyarakat. Pengurus BMG Geuceu iniem menyampaikan bahwa mereka pernah menerima masyarakat di kantor BMG dan berdiskusi langsung dengan masyarakat tersebut tentang tanggapan serta pandangan terkait aktivitas dan anggaran BMG Geuceu Iniem. Namun pengurus BMG Lamdingin menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun jika ada maka para pengurus siap berdiskusi langsung dengan pihak masyarakat.

Pengurus BMG juga menyampaikan bahwa untuk sementara belum tersedianya *website* khusus dalam menyalurkan masukan dan saran. Pengurus BMG terbuka untuk di evaluasi oleh siapapun termasuk oleh publik, Keterbukaan untuk dievaluasi merupakan aspek penting dalam menjaga akuntabilitas publik. Seperti yang di ungkapkan dalam (Governansi, 2022) bahwa transparansi mendukung proses akuntabilitas dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas pemerintah, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik .

2. Tantangan dalam Implementasi Transparansi pada Baitul Mal Gampong

Melalui sesi wawancara dengan Para pengurus Baitul Mal Gampong tentang tantangan yang dihadapi selama ini dalam melaksanakan Transparansi, Peneliti menemukan bahwa kendala utama dalam menjalankan transparansi adalah biaya operasional yang belum memadai, dikarenakan biaya operasional BMG hanya diperoleh dari dana Zakat senif Amil sesuai dengan aturan Peraturan Wali Kota Banda Aceh, berbeda

dengan Baitul Mal pada tingkat Kota dan Provinsi yang juga mendapatkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pengurus BMG juga memberikan informasi bahwa BMG meminimalkan penggunaan dana dari senif Amil Zakat dari yang seharusnya mengingat tidak tercukupinya dana zakat untuk senif lain yang lebih membutuhkan.

Pengurus BMG memberikan penjelasan bahwa Jika ingin menerapkan sistem transparansi yang maksimal tentu butuh biaya, seperti berkoordinasi dengan pihak Auditor dan menyiapkan SDM di lingkungan Internal BMG yang berkualitas dalam hal pencatatan dan pelaporan, serta mendesain *website* yang dibutuhkan untuk sumber informasi masyarakat luas. Peneliti juga menemukan bahwa pengurus BMG sering menggunakan alat operasional pribadi dalam menjalankan eksistensi BMG, serta belum memiliki kantor yang memadai untuk digunakan sebagai kantor operasional seperti tidak adanya komputer dan lainnya.

Tantangan utama yang dihadapi oleh BMG dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas adalah keterbatasan dana operasional dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini menghambat BMG dalam menerapkan sistem yang lebih canggih, seperti audit profesional atau pembuatan *website*. Pengurus BMG juga berharap koordinasi serta pembinaan yang intens dari Baitul Mal Kota dalam menuntaskan tantangan yang dihadapi serta memajukan Baitul Mal pada tingkat desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketika Peneliti menghubungi Komisioner Baitul Mal Kota terkait biaya operasional BMG, Informan memperlihatkan kepada Peneliti Perwal Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang besaran belanja Gampong Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam Perwal Tersebut Baitul Mal Gampong mendapat dana pembinaan dari Anggaran Belanja Gampong. Namun ketika Peneliti mengkonfirmasi ke pada pengurus BMG, bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi tentang poin tersebut.

Peneliti berasumsi bahwa belum terealisasinya Sosialisasi Perwal Kota Banda Aceh terkait dana Pembinaan BMG dikarenakan Perwal tersebut masih baru dan dalam proses Sosialisasi, sehingga pada saat Peneliti melakukan Wawancara pengurus BMG belum mendapatkan sosialisasi terkait Perwal tersebut. Tantangan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi tidak hanya memerlukan niat baik, tetapi juga dukungan finansial dan sumber daya yang memadai. Koordinasi yang lebih baik dengan Baitul Mal Kota (BMK) dan pemerintah daerah mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Gampong (BMG) di Kota Banda Aceh telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Kedua BMG yang diteliti, yaitu BMG Geuceu Iniem dan BMG Lamdingin, telah melakukan pengungkapan informasi kepada publik, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Tantangan utama dalam penerapan transparansi adalah keterbatasan dana operasional dan fasilitas, yang menghambat implementasi sistem audit profesional dan teknologi informasi yang lebih maju. Dukungan dari Baitul Mal Kota dan pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di tingkat desa. adapun saran dari penulis, pertama Penerapan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Transparansi Baitul Mal Gampong, seperti pengembangan *website* atau aplikasi mobile, dalam meningkatkan transparansi. Kedua, mengingat keterbatasan

dana operasional yang menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan transparansi, penelitian selanjutnya dapat mengkaji berbagai strategi untuk meningkatkan dana operasional BMG.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiza, N., Nisa, S., & Afifah, L. N. (2023). BOJONEGORO MEMBAYAR ZAKAT (Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumberrejo- Bojonegoro). *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–20.
- Criado, J. I., & Gil-garcia, J. R. (2019). *Creating public value through smart technologies and strategies and beyond*. 32(5).
- de Fine Licht, K., & de Fine Licht, J. (2020). Artificial intelligence, transparency, and public decision-making: Why explanations are key when trying to produce perceived legitimacy. *AI and Society*, 35(4), 917–926.
- Fikri, M. kanzul, & Najib, A. ainun. (2021). Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Minat dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat, di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 106–121.
- Governansi, K. N. K. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governansi, 1–80.
- Grimmelikhuisen, S., & Meijer, A. (2015). *Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment*. January 2014.
- Hamsa, A., & Ramly, A. (2024). Participation And Role Ulama In Eradication Of Moneylender In Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1844-1852.
- Hasyim, F., Ratnasari, R. T., & Ramly, A. (2023). A Nexus Between Financial Technology Adoption to Digitizing Zakat Payment Behavior. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(2).
- Heald, D. (2013). Strengthening fiscal transparency. *The International Handbook of Public Financial Management*, 711–741.
- Hood, C., & Heald, D. (2012). *Transparency The Key to Better Governance?*
- Junjuran, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan Islamic good corporate governance terhadap tingkat kepercayaan muzakki di lembaga amil zakat dompet amanah umat Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS WEBSITE PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA. 18(2), 13–28.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362-379.
- Mcguire, M., & Porumbescu, G. A. (2016). *25 Years of Transparency Research: Evidence and*

Future Directions. xx, 1–13.

Nugraha, E. (2019). DAN KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT TERHADAP KOMITMEN MUZAKKI : KEPERCAYAAN MUZAKKI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 13(2), 167–186.

Nurfadhilah, I. R. (2019). *Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization : A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia*. 89(Apbec 2018), 252–259.

Perwal_No_38_Tahun_2021.

Qanun. (2018). Qanun No 10 2018. In 2018.

Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1).

Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 190.

Wahyuddin, W., Ramly, A. R., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2020). The Contribution of Village Owned Enterprises in Improving Rural Economy in Nagan Raya Regency. In *Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable Development Trends* (Vol. 2, pp. 47-54).